JURNAL EQUILIBRIUM
Journal homepagehttps://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/equilibrium
E-ISSN 2807-4106

Analisis Laba Industri Manufaktur Sektor Makanan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Penyesuaian Tarif PPN Menjadi 12%

Ega Gandana [1)*], Yuyun Kurniawati [2)]
[1*] *Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, email : egagandana28@gmail.com*
[2] *Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, email : yuyun.kurniawati@plb.ac.id*

I N F O A R T I K E L

Riwayat Artikel:
Received 10 Jan 2026
Revised 14 Jan 2026
Accepted 02 Feb 2026

Keywords:
VAT Rate Adjustments, Operational Profitability, Gross Profit, Manufacturing Sector, Cost Management Effectiveness.

Kata Kunci:
Penyesuaian Tarif PPN, Profitabilitas Operasional, Laba Bruto, Sektor Manufaktur, Efektivitas Manajemen Biaya.

A B S T R A C T

This study attempts to quantitatively measure the implications of the VAT rate adjustment from 11% to 12% on operational profitability, particularly gross profit, in the food and beverage manufacturing segment listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). To examine this impact, we adopted a comparative descriptive research design, comparing financial statement data from the third quarter of 2024 (pre-increase period) with the third quarter of 2025 (post-increase period). A total of 26 companies were selected through purposive sampling to be the subjects of analysis to provide an in-depth picture of this sector's adaptation to changes in tax regulations. The results of the study show that there are variations in the impact among the sample companies. Most companies experienced a decline in gross profit due to increases in raw material, distribution, and operational costs that could not be fully passed on to consumers in order to maintain sales volume (high demand elasticity). Conversely, several companies actually recorded an increase in gross profit due to managerial capabilities in cost efficiency, brand strength, and greater economies of scale in mitigating fiscal pressures. Overall, this study concludes that the resilience of companies' profits amid the 12% VAT policy shock is highly dependent on the characteristics of the product and the effectiveness of each entity's cost management.

A B S T R A K

Penelitian ini berupaya mengukur secara kuantitatif implikasi penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12% terhadap profitabilitas operasional, khususnya laba bruto, pada segmen manufaktur makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Guna menelaah pengaruh ini, kami mengadopsi desain penelitian deskriptif komparatif, membandingkan data laporan keuangan Triwulan III tahun 2024 (periode sebelum kenaikan) dengan Triwulan III tahun 2025 (periode pasca-kenaikan). Sebanyak 26 perusahaan terpilih melalui teknik purposive sampling menjadi subjek analisis untuk memberikan gambaran mendalam mengenai adaptasi sektor ini terhadap perubahan regulasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dampak yang tidak seragam di antara perusahaan sampel. Sebagian besar perusahaan mengalami penurunan laba bruto yang disebabkan oleh peningkatan biaya bahan baku, distribusi, serta operasional yang tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada konsumen guna menjaga volume penjualan (elastisitas permintaan tinggi). Sebaliknya, beberapa perusahaan justru mencatat peningkatan laba bruto karena kemampuan manajerial dalam efisiensi biaya, kekuatan merek, serta skala ekonomi yang lebih besar dalam meredam tekanan fiskal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan laba perusahaan di tengah guncangan kebijakan PPN 12% sangat bergantung pada karakteristik produk dan efektivitas manajemen biaya masing-masing entitas.

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai alat vital dalam memajukan serta mendukung pembangunan ekonomi yang berlaku di tingkat nasional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memainkan peranan krusial dalam mendulang penerimaan negara, menjadikannya salah satu sumber pendapatan utama. Diterapkannya PPN pada hampir semua produk dan jasa memberikan konsekuensi luas baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Merujuk pada Undang Undang Harmonisasi Perpajakan (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021), pemerintah menetapkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula sebesar 10% menjadi 11% dan berencana meningkatkannya lagi menjadi 12% pada tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika ekonomi nasional. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menekan potensi kerugian negara akibat dampak pandemi, sekaligus meningkatkan penerimaan negara guna memperkuat kestabilan fiskal di masa mendatang.

Namun, dari sisi dunia usaha, kenaikan tarif PPN menimbulkan berbagai konsekuensi yang signifikan. PPN yang bersifat tidak langsung pada dasarnya dibebankan kepada konsumen, namun perusahaan menjadi pihak yang harus mengelola perhitungan, pelaporan, serta pemungutan PPN. Dalam konteks perusahaan manufaktur, yang memiliki rantai pasok panjang serta struktur biaya kompleks, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga jual produk di pasar. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya saing produk manufaktur, terutama jika konsumen merespons dengan mengurangi permintaan. Sebuah laporan dari CNBC Indonesia (2024) misalnya, mengangkat kekhawatiran terjadinya "efek domino" kenaikan PPN 12% yang merambah ke berbagai sektor, dimana peningkatan biaya pada satu mata rantai industri akan berdampak pada keseluruhan rantai pasok (Nugroho, 2024). Menurut (Zharifah Yustr Syifa' H, 2025), kenaikan tarif pajak secara umum dapat memicu penurunan permintaan agregat, sebab menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh melonjaknya harga barang dan jasa (Subur & Syata, 2024).

Sektor Manufaktur merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diantara berbagai subsektor, industri makanan dan minuman memiliki peran strategis karena menjadi penggerak utama konsumsi domestik sekaligus penyumbang devisa ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) subsektor ini memberikan kontribusi sebesar 6,57% terhadap total PDB nasional dari sekitar 38% terhadap industri pengolahan nonmigas. Meskipun kontribusinya besar, industri ini menghadapi berbagai tantangan, mencakup lonjakan biaya bahan baku, perubahan kurs mata uang, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan tantangan persaingan global yang kian mendesak. Fenomena tersebut tercermin dari data Laju Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pertumbuhan Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap PDB Nasional

Tahun	Kontribusi terhadap PDB (%)	Pertumbuhan Sektor (%)	Kontribusi terhadap Industri pengolahan (%)	Keterangan
2021	6,34	5,92	37,8	Pemulihan konsumsi domestik
2022	6,52	5,33	38,2	Peningkatan pasca pandemik

2023	6,61	5,05	38,6	Tekanan biaya bahan baku
2024	6,57	4,90	38,1	Dampak kenaikan PPN dan Inflasi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya pola penurunan kecepatan pertumbuhan di sektor industri makanan dan minuman, dari 5,92% pada tahun 2021 menjadi 4,90% pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa profitabilitas industri tersebut tengah mengalami tekanan, yang utamanya dipicu oleh peningkatan beban biaya operasional dan implementasi kebijakan fiskal yang berlaku.

Lebih jauh, dampak kenaikan PPN tidak hanya berhenti pada harga jual dan daya beli konsumen, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan. Laba sebagai indikator utama profitabilitas operasional sangat berpotensi tertekan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban biaya produksi yang tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada konsumen tanpa risiko kehilangan pasar. Perusahaan sering kali menghadapi dilema antara menaikkan harga dan berisiko menurunkan volume penjualan, atau menahan sebagian beban kenaikan PPN tersebut yang pada akhirnya akan menggerus margin keuntungan mereka. Tekanan pada laba ini kemudian dapat berimbas pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan strategi bisnisnya misalnya melalui efisiensi biaya, inovasi produk, atau diversifikasi pasar, maka tekanan finansial berpotensi mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang.

Sektor manufaktur dipilih sebagai fokus penelitian karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian. Penelitian ini menitikberatkan pada industri maknan dan minuman yang terdaftar BEI. Pemilihan entitas publik sebagai objek penelitian berdasarkan data keuangan yang tersedia lebih transparan, akuntabel, dan terstandarisasi sesuai dengan regulasi pasar modal. Dengan adanya laporan keuangan perusahaan publik yang diaudit juga memungkinkan analisis kuantitatif dilakukan secara lebih mendalam dan obyektif. Periode penelitian dipilih secara konsisten agar dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan PPN 12%. Dengan adanya kenaikan PPN yang berlaku pada periode setelahnya, beban yang ditanggung perusahaan berpotensi semakin berat (Yudistira & Nisa, 2024). Hal ini menjadikan penelitian tentang "Analisis Laba Industri Manufaktur Sektor Makanan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Penyesuaian Tarif PPN Menjadi 12%" semakin penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai ketahanan sektor manufaktur menghadapi guncangan fiskal dan ekonomi global.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, beberapa masalah utama dapat dikenali sebagai berikut:

1. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi menambah beban biaya dan memengaruhi laba perusahaan manufaktur sektor makanan.
2. Pertumbuhan subsektor makanan dan minuman cenderung melambat sejak menjelang pemberlakuan tarif PPN 12%.
3. Terdapat fluktuasi laba di industri makanan di BEI yang perlu dianalisis secara komparatif sebelum dan sesudah kenaikan PPN.

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana laba perusahaan manufaktur sektor makanan di BEI sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN 12%?
2. Bagaimana arah perubahan laba setelah diberlakukannya tarif PPN 12%?
3. Adakah dampak penyesuaian PPN terhadap tingkat profitabilitas perusahaan sektor makanan?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi resmi pajak di Indonesia, sesuai UU perpajakan pajak merupakan iuran yang dibayarkan pada negara. Pembayaran ini sifatnya memaksa dan bertujuan untuk membiayai segala kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Meskipun esensi dari undang-undang tersebut menegaskan kewajiban universal dan tidak adanya imbalan kontra-prestasi bagi pembayar pajak perorangan, implikasi filosofisnya terletak pada prinsip solidaritas sosial dan pembiayaan kolektif. Hasil penerimaan pajak, dalam perspektif ekonomi publik, menjadi sumber pendanaan utama untuk penyediaan barang publik serta layanan masyarakat yang memberikan manfaat tidak langsung namun esensial bagi seluruh masyarakat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, seorang pakar terkemuka di bidang perpajakan Indonesia, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, tanpa adanya kewajiban balasan langsung dari pemerintah kepada pembayar pajak. Menurut pandangannya, dana pajak dikumpulkan untuk membiayai berbagai keperluan negara secara kolektif, bukan untuk memberikan keuntungan spesifik kepada individu atau badan yang membayar (Soemitro, 2014).

Berdasarkan dua pengertian di atas, peneliti mendefinisikan pajak secara ringkas sebagai setoran wajib individu atau badan usaha kepada negara yang tunduk pada peraturan perundang-undangan, bersifat tidak sukarela, tanpa imbalan langsung, dan dialokasikan untuk keperluan negara demi meningkatkan kemakmuran warga. Dengan demikian, iuran pajak dari masyarakat pada akhirnya akan direalisasikan kembali kepada mereka melalui pembangunan sarana publik, layanan umum, bantuan subsidi, dan berbagai program pemberdayaan sosial lainnya.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam kerangka (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009) mengenai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bendahara pada badan atau instansi pemerintah memegang tanggung jawab untuk memungut, menyampaikan, serta melaporkan kewajiban pajak. Peran ini secara spesifik berlaku pada transaksi di mana pengusaha (yang merupakan wajib pajak) menyerahkan barang atau jasa kena pajak kepada instansi pemerintah yang bersangkutan.

Menurut Putra Indra Mahardika (2019), mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Pengenaan PPN terjadi di seluruh mata rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer, namun hanya atas pertambahan nilai yang terjadi di setiap tahap tersebut (Kharisma & Furqon, 2023).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti menyederhanakan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor

produksi oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP).

Teori Keynes dan Hubungannya dengan Kenaikan PPN

Teori Keynes menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro, khususnya dalam situasi krisis. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini tampak dalam berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan menjaga stabilitas konsumsi masyarakat, termasuk melalui pengaturan tarif PPN, pemberian bantuan sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Dengan mengoptimalkan peran konsumsi sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, teori Keynes memberikan dasar yang kuat bagi upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan antara profitabilitas, kebijakan pajak, dan kinerja keuangan perusahaan telah banyak diselenggarakan oleh para akademisi sebelumnya. Bagian berikut menyajikan sejumlah temuan dari riset-riset terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani et al., 2025) dengan judul "Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman Periode 2020–2024", diidentifikasi pengaruh rasio profitabilitas (ROA, ROE, dan GPM) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Temuan kunci menunjukkan bahwa rasio Aset (ROA) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR, sementara rasio Ekuitas (ROE) dan margin Laba Kotor (GPM) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individual. Namun, secara simultan, semua variabel profitabilitas tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Penelitian sebelumnya oleh (Chairudin et al., 2024) dalam studi mereka mengenai perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia menginvestigasi dampak rasio keuangan tertentu terhadap pertumbuhan laba. Temuan mereka menunjukkan bahwa NPM, DER, dan ROA secara bersamaan mempengaruhi pertumbuhan laba secara signifikan, sementara Quick Ratio tidak menunjukkan signifikansi. Secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan 97,2% variasi dalam pertumbuhan laba perusahaan yang diteliti.

Penelitian oleh (Zharifah Yustr Syifa' H, 2025) yang berjudul "Pengaruh PPN 12% terhadap Laba Kotor dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Jember" mengeksplorasi dampak regulasi PPN 12% terhadap beberapa indikator keuangan, termasuk laba kotor, likuiditas, profitabilitas (diukur dengan ROA dan ROE), serta solvabilitas. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa pemberlakuan PPN 12% berpotensi mengurangi laba kotor, nilai ROA, dan ROE. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan mempertimbangkan strategi efisiensi operasional dan inovasi dalam penetapan harga produknya.

(Hidayat et al., 2023) – "Analisis Penjualan, Laba Bruto, dan GPM Setelah Kenaikan PPN pada Industri Makanan dan Minuman*"* menganalisis dampak kenaikan

PPN 11% terhadap penjualan, laba bruto, dan margin laba kotor. Hasil penelitian menunjukkan 59% perusahaan mengalami penurunan penjualan; 56% menurun GPM; 8 perusahaan justru meningkat laba brutonya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh (Fanny Permata Gunawan, 2023) mengenai "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Biaya Bahan Baku Terhadap Omset Penjualan Pada PT BUANA RAYA Lestari", ditemukan bahwa perubahan tarif pajak nilai tambah dan harga bahan baku secara besar memengaruhi pendapatan penjualan perusahaan PT Buana Raya Lestari.

Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis hubungan kausal antara peningkatan tarif PPN menjadi 12% dengan kinerja laba perusahaan manufaktur sektor makanan. Berdasarkan teori Keynes, kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak memiliki pengaruh langsung terhadap permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Kenaikan PPN yang merupakan pajak atas konsumsi, pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, dari perspektif dunia usaha, kebijakan ini berpotensi menimbulkan efek berantai pada struktur biaya dan harga jual. Dalam konteks perusahaan manufaktur sektor makanan yang memiliki rantai pasok panjang dan bersifat kompetitif, kenaikan tarif PPN dapat menaikkan beban operasional yang kemudian berdampak pada harga jual produk di pasar.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Bagan kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa langkah kebijakan peningkatan PPN menjadi 12% mempengaruhi pendapatan di perusahaan manufaktur sektor makanan terutama dari sisi penjualan dan memicu peningkatan biaya produksi, yang selanjutnya memengaruhi kinerja laba perusahaan. Dampak tersebut dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu perusahaan menaikkan harga jual produk sehingga berpotensi menurunkan permintaan, atau perusahaan menahan harga untuk menjaga daya saing sehingga menyebabkan penurunan margin laba kotor. Kedua mekanisme ini pada akhirnya menghasilkan perbedaan laba antara periode sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN, yang menjadi dasar perumusan hipotesis penelitian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi kerangka kerja deskriptif komparatif. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya menyajikan gambaran sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena, sekaligus membandingkan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya suatu peristiwa. Dalam konteks ini, penelitian berfokus untuk mengetahui seberapa besar dampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat profitabilitas dalam subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi laba perusahaan sebelum dan setelah kebijakan kenaikan tarif PPN, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menilai adanya perbedaan nilai atau perubahan pada indikator keuangan antara dua periode waktu tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan melalui website resmi Bursa Efek

Indonesia pada (www.idx.co.id). Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi populasi penelitian ini, yang mencakup total 169 entitas. Sebanyak 26 industri manufaktur dari sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dipilih sebagai sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Pemilihan 26 entitas bisnis sebagai sampel didasari oleh kriteria seleksi yang mempertimbangkan beberapa elemen, termasuk pengaruh penerapan PPN sebesar 12% yang sangat dirasakan oleh para pelaku sektor makanan. Data yang digunakan mencakup laporan keuangan Triwulan III tahun 2024 (periode sebelum kenaikan tarif PPN) dan Triwulan III tahun 2025 (periode setelah kenaikan tarif PPN). Periode tiga bulan sebelum dan sesudah perubahan tarif dianggap cukup representatif untuk melihat dampak awal kebijakan tersebut terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan serta membandingkan data pada dua kondisi yang berbeda dalam hal ini, laba perusahaan sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN. Analisis dilakukan dengan cara menyusun tabel perbandingan antara indikator keuangan dari dua periode yang berbeda untuk menilai adanya peningkatan atau penurunan kinerja. Dengan bantuan tabel dan uraian komparatif, peneliti dapat mengamati bagaimana perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, baik dari sisi pendapatan, beban operasional, maupun profitabilitas secara umum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks penelitian ini, laba bruto diartikan sebagai selisih antara pendapatan penjualan dengan seluruh biaya yang timbul langsung dalam proses produksi atau pengadaan barang, sebelum dikurangi biaya operasional tidak langsung lainnya. Perhitungan laba bruto yang digunakan dalam analisis ini merujuk pada data laporan keuangan triwulan III periode 2024 dan 2025, di mana formulanya adalah: Pendapatan Penjualan – Biaya Produksi Barang (HPP). Peningkatan pada biaya produksi barang bisa terjadi, contohnya, dikarenakan lonjakan harga bahan mentah; apabila penyesuaian pada harga jual tidak dilakukan, hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan profitabilitas perusahaan.

Ringkasan laba bruto dan perubahan yang terjadi pada masing-masing perusahaan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Daftar Perbandingan Perusahaan yang Mengalami Penurunan dan Peningkatan Laba Bruto, pada Sub Sektor Makanan dan Minuman

No	Kode	Laba Bruto		Perubahan Naik/Turun
		TW 3 (2024)	TW 3 (2025)	
1.	ICBP	20,643,834	19,904,539	-739,295
2.	MYOR	6,116,618,866,595	5,762,576,945,489	-354,041,921
3.	SKBM	522,791,060,122	239,147,812,424	-283,643,247
4.	ROTI	1,625,066,183,583	1,436,641,931,633	-188,424,251,950
5.	CEKA	371,919,596,440	337,328,496,695	-34,591,099,745
6.	HOKI	93,227,117,777	87,183,059,211	-6,044,058,

				566
7.	PSDN	2,916,243,923	14,647,667	-2,901,596,256
8.	PCAR	18,964,801,331	16,322,353,924	-2,642,447,407
9.	CAMP	502,505,372,592	476,790,416,081	-25,714,956,511
10.	ULTJ	2,224,418	2,056,818	-167,600
11.	INDF	29,693,833	30,260,969	567,136
12.	GOOD	2,555,234,789,765	2,617,916,311,345	62,681,521,580
13.	STTP	1,150,559,513,536	1,210,460,399,006	59,900,885,470
14.	BUDI	290,623	293,149	2,526
15.	TBLA	2,055,768	2,704,473	648,705
16.	DLTA	330,415,307	335,647,740	5,232,433
17.	FOOD	6,864,151,373	9,048,563,590	2,184,412,217
18.	MLBI	1,425,867	1,459,647	33,780
19.	PANI	1,195,804,798	2,033,315,800	837,511,002
20.	IKAN	14,826,102,888	15,260,211,325	434,108,437
21	KEJU	278,281,023,463	336,543,918,380	58,262,894,917
22	ADES	668,494	947,375	278,881
23	SKLT	419,650,329,459	516,149,783,548	96,499,454,089
24	AISA	533,597	570,890	37,293
25	CLEO	1,158,415,305,381	1,196,739,480,079	38,324,174,698
26	DMND	1,553,624	1,645,977	92,353
JUMLAH				-578,873,290

Berdasarkan Tabel 2.1 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mengalami penurunan laba bruto pada TW III 2025, sementara beberapa perusahaan lainnya mencatat peningkatan laba bruto. Temuan ini mengindikasikan adanya variasi kinerja keuangan antar perusahaan dalam sektor yang sama selama periode penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 12% memberikan dampak yang beragam terhadap laba bruto perusahaan manufaktur sektor makanan. Dominasi penurunan laba pada sebagian besar perusahaan mengindikasikan bahwa kenaikan pajak konsumsi berpotensi meningkatkan beban biaya dan menekan margin keuntungan, terutama ketika perusahaan tidak sepenuhnya mampu mengalihkan kenaikan tersebut kepada konsumen.

Perusahaan dengan penurunan laba bruto :

1. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) pada TW III 2025 mencatat laba bruto sebesar Rp19.904.539. Penurunan laba bruto ini mencerminkan adanya tekanan pada margin laba akibat meningkatnya biaya bahan baku dan kemasan. Kebijakan perusahaan dalam menjaga stabilitas harga jual untuk mempertahankan volume penjualan menyebabkan kenaikan biaya produksi

tidak sepenuhnya dialihkan kepada konsumen.

2. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) membukukan laba bruto sebesar Rp5.762.576.945.489. Penurunan laba bruto tersebut menunjukkan meningkatnya biaya pokok produksi, khususnya yang berasal dari bahan baku impor dan biaya distribusi. Persaingan yang ketat di industri makanan ringan membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menaikkan harga jual, sehingga margin laba mengalami penurunan.
3. PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) mencatat laba bruto sebesar Rp239.147.812.424, yang menunjukkan penurunan cukup tajam. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya biaya bahan baku perikanan, energi, serta penyimpanan dingin yang tidak sepenuhnya dapat dikompensasi melalui harga jual produk.
4. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) dengan laba bruto sebesar Rp1.436.641.931.633 menunjukkan adanya tekanan pada margin laba. Peningkatan biaya bahan baku utama seperti tepung terigu dan gula, serta biaya distribusi, menjadi faktor utama yang memengaruhi penurunan laba bruto perusahaan.
5. Penurunan laba bruto juga dialami oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR), PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP), dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ). Pola yang relatif sama terlihat pada perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu meningkatnya biaya produksi dan distribusi yang tidak sepenuhnya dapat dialihkan ke harga jual, sehingga margin laba mengalami penurunan.

Perusahaan dengan peningkatan laba bruto :

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, beberapa perusahaan menunjukkan peningkatan laba bruto pada TW III 2025.

1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mencatat laba bruto sebesar Rp30.260.969, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan skala ekonomi dan efisiensi biaya produksi.
2. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) membukukan laba bruto sebesar Rp2.617.916.311.345. Peningkatan laba bruto ini menunjukkan pertumbuhan volume penjualan yang disertai dengan pengendalian biaya pokok produksi yang efektif.
3. PT Siantar Top Tbk (STTP) dengan laba bruto sebesar Rp1.210.460.399.006 menunjukkan keberhasilan strategi penjualan produk bermargin tinggi serta efisiensi operasional yang lebih baik.
4. Peningkatan laba bruto juga dicatat oleh PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU), PT Sekar Laut Tbk (SKLT), dan PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO). Kondisi ini mencerminkan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk olahan serta kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan distribusi secara efisien.
5. Selain itu, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), dan PT Era Mandiri Cemerlang Tbk (IKAN) juga menunjukkan peningkatan laba bruto, yang mencerminkan stabilitas permintaan dan perbaikan kinerja operasional.

Hal ini menunjukan bahwa perubahan laba bruto perusahaan sektor makanan dan minuman dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi, elastisitas permintaan konsumen, serta kemampuan perusahaan dalam mengendalikan efisiensi operasional. Perusahaan dengan skala besar dan diversifikasi produk cenderung lebih mampu mempertahankan atau meningkatkan laba bruto dibandingkan perusahaan dengan skala usaha yang lebih kecil.

Perubahan laba bruto perusahaan sektor makanan dan minuman pada TW III 2025 berkaitan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang berpotensi meningkatkan harga jual

dan beban biaya perusahaan. Perusahaan dengan produk berelastisitas tinggi cenderung menahan kenaikan harga untuk menjaga daya beli konsumen, sehingga kenaikan beban pajak berdampak pada penurunan margin laba bruto.

Dengan demikian, kenaikan PPN 12% tidak berdampak seragam terhadap seluruh perusahaan sektor makanan dan minuman. Dampaknya sangat ditentukan oleh karakteristik produk, elastisitas permintaan, serta efektivitas manajemen biaya dan strategi penetapan harga masing-masing Entitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dan pandangan Keynesian yang menyatakan bahwa kenaikan beban pajak dapat memengaruhi kinerja perusahaan melalui penurunan daya beli dan peningkatan biaya produksi. Dalam konteks ini, perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan harga jual secara optimal cenderung mengalami penurunan margin laba bruto.

SIMPULAN

Dari temuan dan diskusi seputar fluktuasi laba kotor entitas industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara Kuartal III 2024 dan Kuartal III 2025, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Sebagian besar industri makanan dan minuman terjadi penurunan laba bruto pada TW III 2025, sementara sebagian perusahaan lainnya mampu mencatat peningkatan laba bruto. Kondisi ini mengindikasikan adanya variasi kinerja keuangan antar perusahaan dalam sektor yang sama selama periode penelitian.

2. Penurunan laba bruto pada sejumlah perusahaan mencerminkan adanya tekanan ongkos produksi, yang berasal dari kenaikan harga bahan baku, biaya distribusi, serta beban operasional lainnya. Perusahaan dengan produk yang memiliki elastisitas permintaan tinggi cenderung menahan kenaikan harga jual untuk menjaga volume penjualan, sehingga kenaikan biaya tersebut berdampak langsung pada penurunan margin laba bruto.

3. Perusahaan yang mampu meningkatkan laba bruto menunjukkan kemampuan manajerial yang lebih baik dalam mengendalikan biaya produksi dan menyesuaikan strategi harga. Faktor skala usaha, diversifikasi produk, serta kekuatan merek menjadi penentu utama dalam menjaga bahkan meningkatkan margin laba bruto di tengah tekanan biaya dan perubahan kebijakan fiskal.

4. Kenaikan tarif PPN sebesar 12% memberikan dampak yang berbeda antar perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mampu meneruskan kenaikan beban pajak kepada konsumen, kenaikan PPN berkontribusi terhadap penurunan laba bruto. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki efisiensi operasional dan daya tawar pasar yang kuat relatif lebih mampu meredam dampak kenaikan PPN terhadap kinerja laba bruto.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan laba bruto perusahaan sektor makanan dan minuman tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat penjualan, tetapi juga oleh struktur biaya, elastisitas permintaan, serta kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika kebijakan dan kondisi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Aminatul Husna Lubis, Linda Hetri Suriyanti, D. P. P. (2023). *PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI RESPON KENAIKAN TARIF PPN 11%*. *8*(1).

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*.

Chairudin, R., Amri, U., & Kartawinata. (2024). *ANALISIS PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG*

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). *2*(1), 216–231.

David, R. A., & Laura, V. Z. (2024). *The Effects of Adopting a Value Added Tax on Firms*. *11469*.

Eyide, M. U., & Onwuchekwa, J. C. (2025). *Comparative analysis of value-added tax revenue among consumer goods , industrial goods , and banking sectors in Nigeria*. *17*(June), 36–45. https://doi.org/10.5897/JAT2024.0631

Fanny Permata Gunawan, V. S. (2023). *PENGARUH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BIAYA BAHAN BAKU TERHADAP OMSET PENJUALAN PADA PT BUANA RAYA LESTARI*. *12*(5), 2706–2721.

Hidayat, M., Afifah, J., Firdaus, F., Sari, W. N., Hairunnisah, A. I., & Purwaningrum, A. H. (2023). *ANALISIS PENJUALAN, LABA BRUTO DAN GROSS PROFIT MARGIN SETELAH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA IDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN*. *12*(April 2022), 529–542.

Kharisma, N., & Furqon, I. K. (n.d.). *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Masyarakat (PPN)*. *2*, 295–303.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi Publisher. https://books.google.co.id/books?id=c-_czwEACAAJ

Mulyo Dwi Atmojo, S. M. R. O. B. (2016). *ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI*. *8*(96), 1–11.

Nugroho, M. R. A. (2024). *Efek Domino Kenaikan PPN 12%, Merambah ke Berbagai Sektor*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240321043409-4-523876/efek-domino-kenaikan-ppn-12-merambah-ke-berbagai-sektor

Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Anak Hebat Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=sXxOEAAAQBAJ

Rahmadani, N. P., Sari, I. Y., Vamirien, N. O., Aprilya, L., & Rasio, K. K. (2025). *Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode 2020-2024*. *4*(10), 2395–2408.

Soemitro, R. (2014). *ASAS DAN PERPAJAKAN 1* (Edisi Kedu). PT. REFIKA ADITAMA. https://refika.co.id/298-asas-dan-dasar-perpajakan-1.html

Subur, H., & Syata, W. M. (2024). *ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA*. *1*(5), 205–210.

Tamba, S. P. (2025). *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*. Direktorat Jendral Pajak. http://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (2009).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021

Yudistira, E., & Nisa, T. (2024). *Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pendapatan Wajib Pajak Badan Usaha di Kota Metro*. *4*, 8090–8104.

Zharifah Yustr Syifa' H, S. (2025). *Pengaruh Ppn 12 % terhadap Laba Kotor dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Jember*. *9*, 10249–10254.